

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan regional, sektor industri sering dijadikan indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah karena keterkaitannya dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan jasa Kuncoro, (2018) Tambunan, (2019). Penelitian Rahmah & Widodo, (2019) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan lapangan usaha serta kesempatan kerja, sehingga berkontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi regional melalui output sektor tersebut dan penyerapan tenaga kerja.

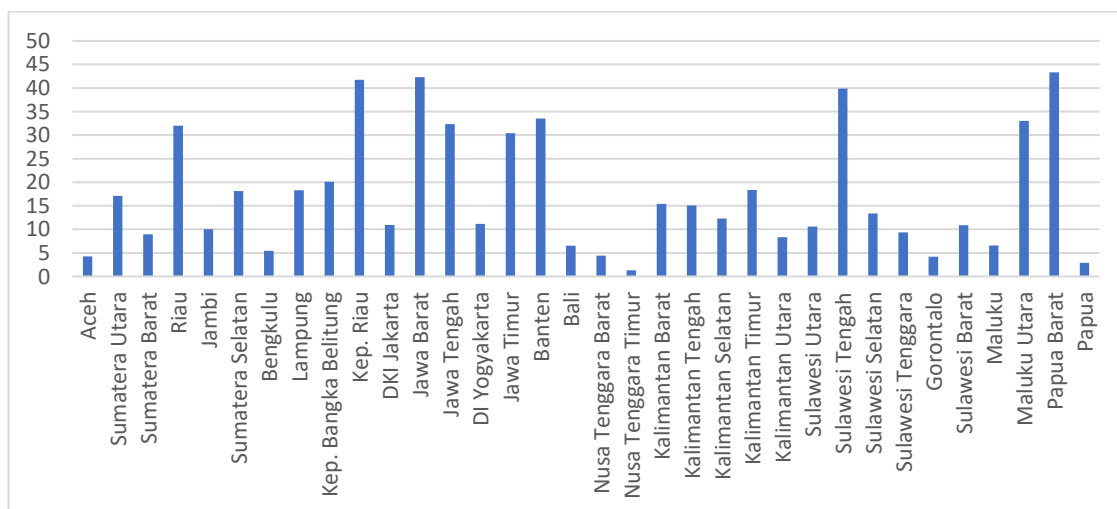
Perkembangan sektor industri pengolahan juga mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki, baik sumber daya manusia, infrastruktur, maupun investasi. Daerah dengan basis industri yang kuat cenderung memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih bertumpu pada sektor primer. Penelitian oleh Safar Nasir & Suropto, (2025) menemukan bahwa peningkatan kapasitas industri berpengaruh terhadap kenaikan nilai tambah sektoral dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian tidak selalu merata di setiap daerah. Perbedaan struktur ekonomi, kapasitas produksi, tingkat

investasi, serta kualitas infrastruktur pembangunan menyebabkan adanya variasi kinerja sektor industri antarwilayah. Sektor industri pengolahan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi regional (Alfarisy, 2025)

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menempatkan sektor industri pengolahan sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan penguatan industri manufaktur yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan daya saing industri di tingkat global. Pengembangan industri pengolahan juga diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui pemerataan investasi dan pembangunan infrastruktur industri (Bappenas, 2020).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja sektor industri pengolahan adalah nilai PDRB sektor industri pengolahan. Nilai PDRB mencerminkan tingkat aktivitas produksi serta kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan perkembangan industri antarwilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistika, (Data Diolah 2024)

Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (%)

Berdasarkan data tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB antarprovinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Terdapat tiga provinsi dengan kontribusi di atas 30 persen, yaitu Papua Barat sebesar 43 persen, Jawa Barat sebesar 42 persen, dan Banten sebesar 33 persen. Tingginya kontribusi di Jawa Barat dipengaruhi oleh berkembangnya kawasan industri manufaktur seperti industri otomotif, tekstil, makanan dan minuman, serta elektronik yang terintegrasi dengan pasar nasional dan internasional. Banten juga menunjukkan kontribusi besar karena keberadaan kawasan industri di Cilegon dan Tangerang yang didominasi industri kimia, baja, dan petrokimia. Sementara itu, Papua Barat memiliki kontribusi tinggi karena struktur ekonominya ditopang oleh industri pengolahan berbasis sumber daya alam, terutama pengolahan hasil pertambangan dan mineral yang memberikan nilai tambah besar terhadap PDRB daerah.

Sebaliknya, terdapat beberapa provinsi dengan kontribusi sektor industri pengolahan di bawah 20 persen, yaitu Bali sebesar 6 persen, Sulawesi Tenggara sebesar 9 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 4 persen. Rendahnya kontribusi di Bali disebabkan oleh dominasi sektor pariwisata dan jasa dalam struktur ekonominya, sehingga sektor industri manufaktur tidak menjadi penopang utama PDRB. Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan kontribusi industri yang relatif rendah karena perekonomiannya masih banyak bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan, sementara aktivitas industri pengolahan belum berkembang secara luas dan terdiversifikasi.

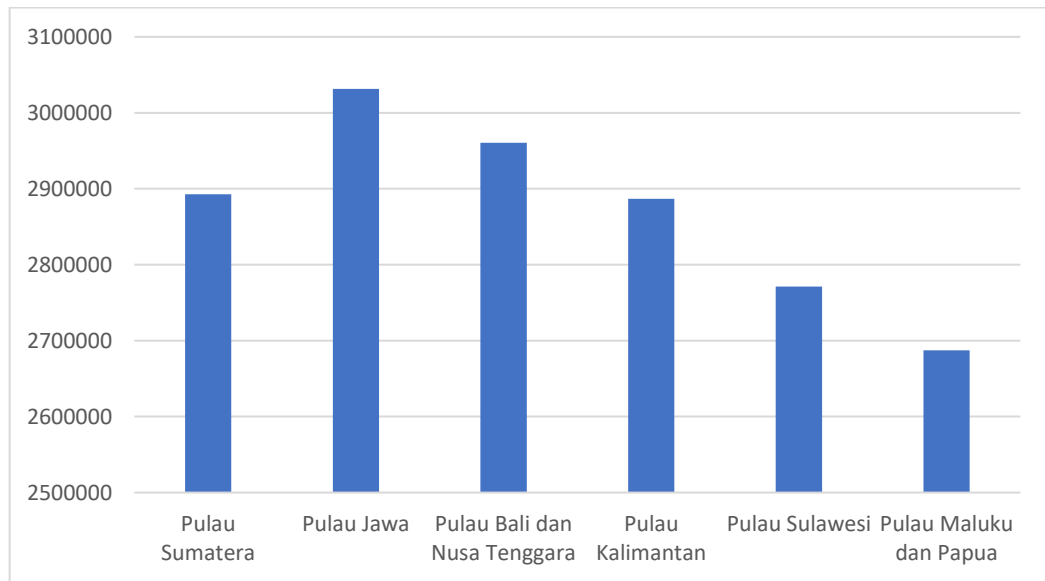
Ketimpangan kontribusi sektor industri pengolahan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dan kemampuan daerah dalam mengembangkan sektor industrinya berbeda-beda. Perbedaan tersebut diduga tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan kebijakan daerah seperti tingkat upah tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, serta arus investasi yang masuk ke daerah. Variasi kondisi tersebut dapat memengaruhi iklim usaha dan produktivitas sektor industri pengolahan di masing-masing provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 19,07 persen, lebih tinggi dibandingkan sektor perdagangan sebesar 13,17 persen, sektor pertanian sebesar 13,10 persen, sektor konstruksi sebesar 9,83 persen, serta sektor pertambangan sebesar 8,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki peran

yang paling dominan dalam pembentukan output nasional. Dominasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa sektor industri pengolahan menjadi sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut. (Badan Pusat Statistik, 2026).

Secara teoretis, pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, diantaranya kebijakan upah tenaga kerja, belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, serta investasi. Ketiga faktor tersebut secara konseptual diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat kapasitas industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Faruddin & Djamaluddin, (2025). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Indonesia periode 2020–2024.

Kebijakan upah minimum provinsi merupakan salah satu faktor yang berkaitan langsung dengan aktivitas sektor industri, terutama industri padat karya. Tingkat upah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja sekaligus berpotensi memengaruhi biaya produksi industri.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (diolah kembali)

Gambar 1. 2 Rata-Rata Upah Minimum Provinsi per Pulau di Indonesia Tahun 2020–2024 (Rupiah)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya variasi tingkat upah minimum antarwilayah kepulauan di Indonesia. Pulau Jawa tercatat memiliki tingkat upah minimum rata-rata tertinggi dibandingkan pulau lainnya, diikuti oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, Pulau Sulawesi serta Pulau Maluku dan Papua menunjukkan tingkat upah minimum yang relatif lebih rendah. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan kondisi ekonomi antarwilayah kepulauan, baik dari sisi tingkat biaya hidup, konsentrasi kegiatan industri, maupun produktivitas tenaga kerja.

Variasi tingkat upah minimum antarwilayah tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kinerja sektor industri pengolahan. Upah merupakan salah satu komponen utama biaya produksi, sehingga perbedaan tingkat upah dapat memengaruhi efisiensi produksi dan daya saing industri. Wilayah dengan tingkat upah minimum yang tinggi, seperti Pulau Jawa, cenderung memiliki sektor industri

pengolahan yang lebih berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Namun demikian, tingginya upah juga berpotensi meningkatkan biaya produksi yang dapat menekan output industri. Sebaliknya, wilayah dengan upah yang lebih rendah memiliki potensi biaya produksi yang lebih kompetitif, tetapi belum tentu diikuti oleh perkembangan industri yang tinggi.

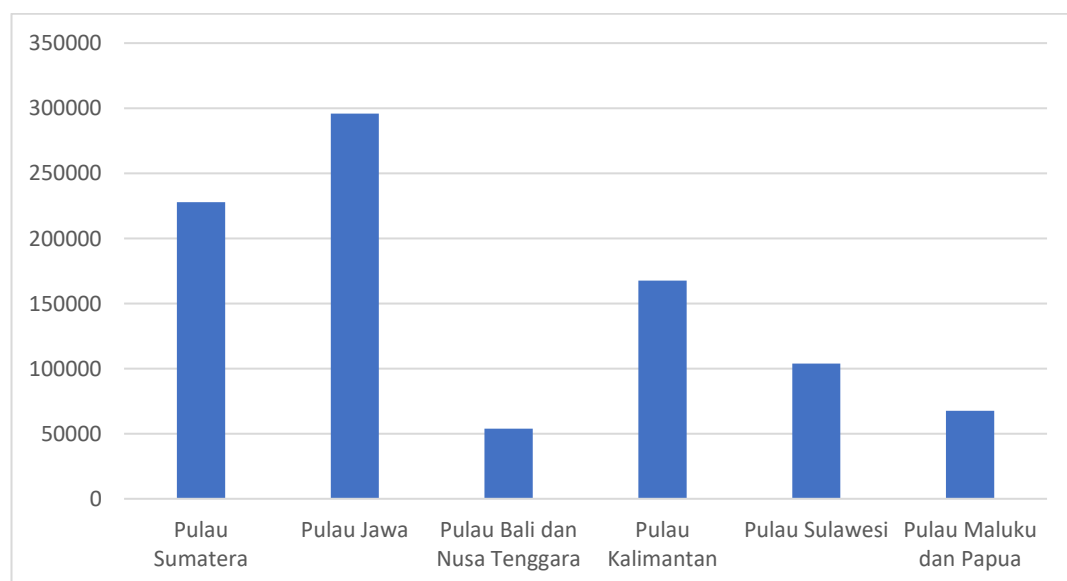
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat upah minimum dan kinerja sektor industri pengolahan tidak selalu bersifat linier. Pada beberapa wilayah, tingkat upah yang tinggi diikuti oleh tingginya kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB, namun pada wilayah lain, tingkat upah yang rendah tidak selalu mampu mendorong peningkatan aktivitas industri. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor lain yang turut memengaruhi kinerja industri pengolahan, serta menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap PDRB sektor industri pengolahan dapat berbeda antarwilayah.

Temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat upah minimum memiliki keterkaitan dengan kinerja sektor industri pengolahan. Penelitian oleh Winarto et al. (2022). Pengaruh Upah Minimum terhadap Industri Pengolahan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah tidak selalu berdampak negatif terhadap kegiatan industri, melainkan dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan output industri.

Hasil tersebut memperkuat bahwa perbedaan tingkat upah minimum antarwilayah berpotensi memengaruhi kinerja sektor industri pengolahan yang

tercermin dalam nilai PDRB sektor industri pengolahan. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak selalu seragam di setiap daerah, karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta struktur industri yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengaruh upah minimum terhadap sektor industri pengolahan dalam konteks perbedaan antarwilayah di Indonesia.

Belanja pemerintah pada sektor infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas industri. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi, serta menurunkan biaya logistik sehingga mendorong efisiensi proses produksi.



Sumber: Djpk Kemenkeu, 2020-2024 (diolah kembali)

Gambar 1. 3 Total Belanja Infrastruktur per Pulau di Indonesia Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perbedaan alokasi belanja infrastruktur antarwilayah kepulauan di Indonesia. Pulau Jawa memiliki alokasi belanja infrastruktur tertinggi dibandingkan pulau lainnya, diikuti oleh Pulau

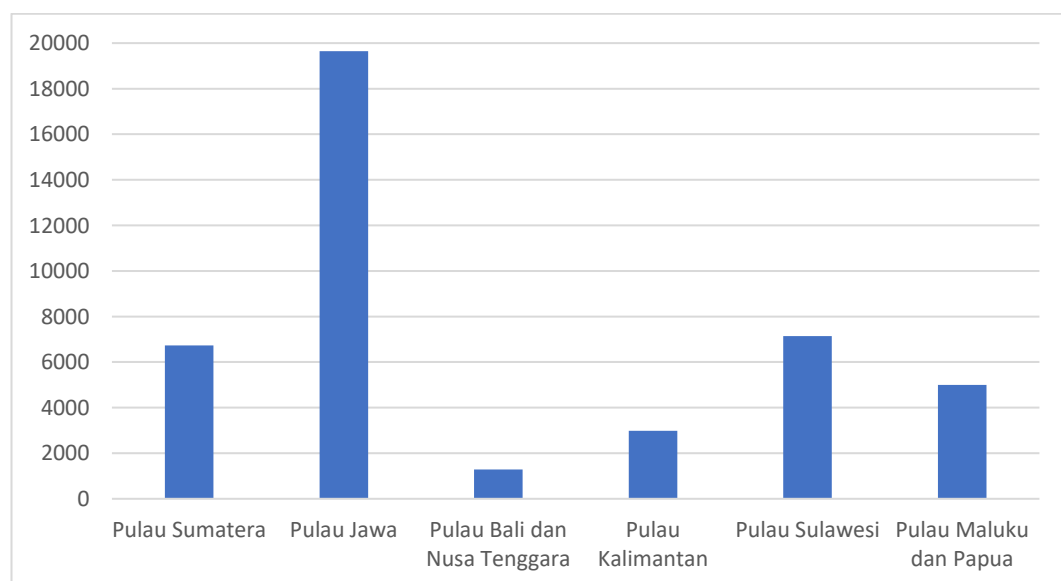
Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan tingkat belanja infrastruktur yang relatif lebih rendah. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas fiskal daerah, skala kebutuhan pembangunan, serta prioritas kebijakan di masing-masing wilayah kepulauan.

Kesenjangan alokasi belanja infrastruktur antar pulau ini berpotensi memengaruhi perkembangan sektor industri pengolahan di setiap wilayah. Wilayah dengan belanja infrastruktur yang lebih tinggi, seperti Pulau Jawa, cenderung memiliki dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai sehingga mampu menunjang aktivitas produksi industri secara lebih efisien. Sebaliknya, wilayah dengan alokasi belanja yang lebih rendah dapat menghadapi keterbatasan dalam hal konektivitas, distribusi, maupun penyediaan energi yang pada akhirnya memengaruhi kapasitas dan daya saing industri pengolahan.

Pembangunan infrastruktur yang memadai terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi produksi, konektivitas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor industri pengolahan (Syadullah & Setyawan, 2021). Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jaringan listrik, dan sarana transportasi berperan penting dalam memperlancar distribusi bahan baku maupun hasil produksi sehingga dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas industri sehingga dapat berpengaruh positif terhadap PDRB sektor industri pengolahan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang baik juga mendorong masuknya investasi ke suatu wilayah karena memberikan kemudahan akses serta kepastian dalam kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, perbedaan tingkat belanja

infrastruktur antarwilayah kepulauan berpotensi menimbulkan perbedaan dalam kinerja sektor industri pengolahan yang tercermin dalam nilai PDRB sektor industri pengolahan. Besarnya belanja infrastruktur menjadi salah satu faktor strategis yang dapat memengaruhi efisiensi produksi, minat investasi, serta pertumbuhan aktivitas industri di masing-masing pulau.

Faktor lain yang berperan penting dalam perkembangan sektor industri pengolahan adalah investasi. Investasi merupakan sumber pembiayaan utama dalam memperluas kapasitas produksi, meningkatkan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (diolah kembali)

Gambar 1. 4 Total Investasi per Pulau di Indonesia Tahun 2020–2024 (Juta US\$)

Berdasarkan grafik rata-rata investasi antarwilayah kepulauan, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan di Indonesia. Pulau Jawa menunjukkan tingkat investasi tertinggi dibandingkan pulau lainnya, disusul oleh Pulau Sulawesi

dan Pulau Sumatera. Sementara itu, Pulau Maluku dan Papua serta Pulau Kalimantan berada pada tingkat menengah, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan rata-rata investasi yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini mencerminkan variasi daya tarik ekonomi, ketersediaan infrastruktur, konsentrasi industri, serta iklim investasi di masing-masing wilayah kepulauan.

Perbedaan tingkat investasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kinerja sektor industri pengolahan. Investasi merupakan sumber utama pembentukan modal yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas skala usaha, serta mendorong adopsi teknologi dalam kegiatan industri. Wilayah dengan tingkat investasi yang tinggi, seperti Pulau Jawa, cenderung memiliki sektor industri pengolahan yang lebih berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat investasi yang lebih rendah menghadapi keterbatasan dalam pengembangan kapasitas produksi, sehingga berdampak pada rendahnya aktivitas industri pengolahan.

Namun demikian, hubungan antara investasi dan kinerja industri pengolahan tidak selalu bersifat linier. Pada beberapa wilayah, tingginya investasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas investasi dalam mendorong kinerja industri dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, serta struktur ekonomi daerah.

Penelitian Putri & Dhea (2019) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan. Peningkatan

investasi mendorong pertumbuhan output industri melalui perluasan kapasitas produksi, peningkatan penggunaan teknologi, serta peningkatan efisiensi dalam proses produksi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat investasi di suatu wilayah, maka semakin besar juga potensi peningkatan PDRB sektor industri pengolahan.

Ketimpangan nilai PDRB sektor industri pengolahan antarprovinsi menunjukkan adanya perbedaan tingkat perkembangan industri di Indonesia. Variasi tingkat upah minimum, perbedaan alokasi belanja infrastruktur, serta distribusi investasi yang belum merata merupakan gejala empiris yang dapat diamati dan diduga berkontribusi terhadap perbedaan tersebut. Namun demikian, gejala-gejala tersebut belum mampu menjelaskan secara pasti faktor mana yang paling dominan dalam memengaruhi kinerja sektor industri pengolahan di masing-masing wilayah.

Masalah dalam penelitian ini yaitu terdapat ketimpangan PDRB sektor industri pengolahan antarprovinsi yang diduga berkaitan dengan perbedaan upah minimum, belanja infrastruktur, dan investasi. Meskipun penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki hubungan dengan pertumbuhan sektor industri, hasil yang diperoleh masih menunjukkan temuan yang beragam. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan teoretis yang memerlukan kajian empiris lebih lanjut, khususnya dalam konteks perbedaan karakteristik ekonomi antarprovinsi di Indonesia.

Di sisi lain, kondisi empiris menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan industri antarwilayah, distribusi investasi yang belum merata, serta

perbedaan kapasitas infrastruktur daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan praktis antara kondisi yang diharapkan secara teori dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh upah minimum provinsi, belanja infrastruktur, dan investasi terhadap PDRB sektor industri pengolahan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan ketiga variabel tersebut terhadap perkembangan sektor industri pengolahan di Indonesia menggunakan data panel 34 provinsi periode tahun 2020-2024.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan pembangunan ekonomi daerah secara lebih merata.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini menjadi beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024?

3. Bagaimana tingkat elastisitas (kepekaan) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan terhadap Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024
2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024
3. Menganalisis tingkat elastisitas (kepekaan) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan terhadap Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu dapat bermanfaat karena adanya hal baru dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel Belanja Infrastruktur, sebuah pendekatan yang selama ini belum banyak diteliti mengenai PDRB Sektor Industri Pengolahan di 34 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Infrastruktur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB sektor industri

pengolahan di 34 provinsi di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi marginal dari modal publik tersebut terhadap output industri pengolahan masih relatif rendah dalam jangka pendek. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya *time lag* (keterlambatan waktu) dalam realisasi manfaat infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sektor industri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian tentang Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan upah minimum, alokasi belanja infrastruktur, serta peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan cakupan seluruh provinsi sebagai unit analisis, yaitu 34 provinsi di Indonesia. Penelitian tidak

No	Kegiatan	2026																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																								
2	Penulisan BAB I, II dan III																								
3	Bimbingan & Revisi																								
4	Seminar Usulan Penelitian																								
5	Revisi Usulan Penelitian																								
6	Penulisan BAB IV																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Seminar Hasil																								
9	Revisi Seminar Hasil																								
10	Sidang Skripsi																								